

**PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN
DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Periode 2014-2018)



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Sarach Respilia Sukma

No. Mahasiswa: 16312390

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN
DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Periode 2014-2018)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi UII

Oleh :

Nama: Sarach Respilia Sukma

No. Mahasiswa: 16312390

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 18 Juni 2020

Penulis,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the text "METERAI TEMPEL" and "6000" in large numbers, and the serial number "FF205AHF477154968". The signature is written in black ink over the stamp.

(Sarach Respilia Sukma)

**PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN
DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Periode 2014-2018)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi UII

Oleh :

Nama: Sarach Respilia Sukma

No. Mahasiswa: 16312390

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 14 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



(Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si., DBA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN DAN TEMUAN
AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG PERIODE 2014-2018)

Disusun Oleh : SARACH RESPILIA SUKMA

Nomor Mahasiswa : 16312390

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari, tanggal: Senin, 06 Juli 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Ataina Husriyati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak.

Penguji : Fira Roman Cahaya, S.E., M.Com., Ph.D., CSRS, CSRA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman benderang seperti saat ini.

Penelitian berjudul “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2014-2018) disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penlusi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat-Nya senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan serta kemudahan kepada hamaba-Nya dalam segala urusan.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim serta alam. Semoga keteladanan beliau akan selalu menjadi pedoman bagi penulis untuk terus memperbaiki diri serta menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.
3. Sapri, S.Pd.I dan Yulizar S.H., M.Si., selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si., DBA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
6. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
7. Terima Kasih untuk Fiorentini Rachma Diandi atas waktu dan dukungan yang telah diberikan.
8. Terima kasih untuk Mba titis, Mba diana, Mba ade, Mba ayu, Nadhila, dan Naziatul sebagai teman kos yang selalu memberi semangat.
9. Terima kasih untuk UII Ayo Mengajar yang sudah memberikan pengalaman terbaik dan memberikan ilmu yang luar biasa.

10. Terima kasih untuk teman teman KKN 105 Sirebut sudah menjadi keluarga bagi penulis.
11. Terima kasih untuk Bapak Mukholil dan Ibu Mukholil atas pengalaman serta kasih sayang bagi penulis.
12. Terima kasih untuk Muhamad Iqbal Akbar, Muhamad Dhika Alvando, Regita Cahyani untuk dukungan dan pertolongan selama ini.
13. Terima kasih untuk Nadhila Mayang Arumsari untuk semua pengalaman dan pelajaran serta dukungan bagi penulis.
14. Terima kasih untuk Tri Nur Astuti sebagai teman yang sangat baik hati, lembut, penyabar, dan pembawa ceria dan pengalaman berharga yang kita lalui bersama.
15. Terima kasih untuk Dira Sartika Ardi sebagai teman yang selalu mendorong temannya untuk tidak berputus asa dan semangat yang tinggi dan pembawa ceria dan pengalaman berharga yang kita lalui bersama.
16. Terima kasih untuk Arini Dwi Pratiwi teman 24 jam dan teman selalu berantem terima kasih untuk bantuan Arini selama 4 tahun dan pembawa ceria dan pengalaman berharga yang kita lalui bersama.
17. Terima kasih kepada Muhammad Fadhly Rizky Octavio, S.AK atas kesabaran dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
18. Terima kasih Kayyisa Hazimah atas kesempatan dan pengalaman luar biasa yang tidak pernah didapatkan sebelumnya.

19. Terima kasih kepada kakak-kakak Zhafran Afshin, Mas Akmal, Mas Dayat, Mbak Nelly, Mas Vio atas doa dan dukungannya selama ini.
20. Terima kasih kepada Nadia Husnaningtyas atas semangat dan dukungannya yang tidak lupa kepada penulis.
21. Terima kasih untuk teman-teman Atharfaizi, Dira, Arini, Fadhillah, dan Nauval atas pengalaman terbaik yang dilakukan.
22. Terima Kasih kepada Luthfi Radifan Ihtisyamuddin atas semangat, doa, dan motivasi kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
23. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, doa, serta motivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Wa'alaykumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Penulis,



Sarach Respilia Sukma

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Halaman Sampul | i |
| Halaman Judul..... | ii |
| Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme | iii |
| Halaman Pengesahan | iv |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi..... | x |
| Abstrak | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat penelitian..... | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 8 |
| 2.1.1 Teori Stewardship | 8 |
| 2.1.1 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 9 |
| 2.1.3 Kekayaan Daerah | 10 |
| 2.1.5 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah | 11 |
| 2.1.6 Ukuran Legislatif..... | 12 |
| 2.1.7 Temuan Audit..... | 12 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| 2.3. Hipotesis Penelitian | 27 |
| 2.3.1 Kekayaan Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD | 27 |
| 2.3.2 Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD | 28 |
| 2.3.3 Jumlah SKPD Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD | |

| | |
|--|-----------|
| | 28 |
| 2.3.4 Ukuran Legislatif Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD | 29 |
| 2.3.5 Temuan Audit Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD | 30 |
| 2.4 Kerangka Penelitian..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| 3.1 Populasi dan Sampel..... | 32 |
| 3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel..... | 32 |
| 3.2.1 Variabel bebas (independen)..... | 33 |
| 3.2.2 Variabel terikat (dependen)..... | 36 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 38 |
| 3.4 Metode Analisis Data | 38 |
| 3.4.1 Uji Statistik Deskriptif | 38 |
| 3.4.2 Uji Asumsi Klasik | 39 |
| 3.4.3 Analisis Regresi..... | 40 |
| BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN | 43 |
| 4.1 Pemilihan Sampel..... | 43 |
| 4.2 Analisis Deskriptif..... | 44 |
| 4.3 Uji Asumsi Klasik | 47 |
| 4.3.1 Uji Normalitas | 48 |
| 4.3.2 Uji Multikolinearitas | 49 |
| 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas | 50 |
| 4.4 Analisis Regresi Linier Berganda..... | 51 |
| 5.5 Uji Koefisien Determinasi | 53 |
| 5.6 Uji Hipotesis..... | 53 |
| 5.7 Pembahasan | 55 |
| 5.7.1 Kekayaan Daerah | 55 |
| 5.7.2 Ukuran Pemerintah Daerah | 56 |

| | | |
|---------------------------|--|----|
| 5.7.3 | Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah | 57 |
| 5.7.4 | Ukuran Legislatif..... | 58 |
| 5.7.5 | Temuan Audit..... | 59 |
| BAB V..... | | 61 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 61 |
| 5.1 | KESIMPULAN | 61 |
| 5.2 | SARAN..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 63 |
| LAMPIRAN 1..... | | 67 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 17 |
| Tabel 4.1 Dasar-Dasar Penentuan Sampel | 45 |
| Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif | 46 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas | 49 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas | 50 |
| Tabel 4.5 Analisis Regresi Berganda | 57 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Penelitian | 32 |
| Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 51 |

LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Tabel <i>checklist</i> Kriteria Tingkat Pengungkapan LKPD Sesuai dengan SAP | 68 |
| Lampiran 2 Tabel Tingkat Pengungkapan LKPD | 88 |
| Lampiran 3 Tabel Ukuran Legislatif | 89 |
| Lampiran 4 Tabel Jumlah SKPD | 90 |
| Lampiran 5 Tabel Ukuran Pemerintah | 91 |
| Lampiran 6 Tabel Kekayaan Daerah | 93 |
| Lampiran 7 Temuan Audit | 95 |
| Lampiran 8 Hasil Uji dan Regresi | 96 |

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan sampel 30 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat pengaruh negatif temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tidak terdapat pengaruh antara Jumlah SKPD, Ukuran Pemerintah, Kekayaan Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci : Ukuran legislatif, Jumlah SKPD, Ukuran Pemerintah, Kekayaan Daerah, Temuan Audit, tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the level of mandatory disclosure of District / City Government Financial Statements in the Bangka Belitung Islands Province. The population of this study is the regencies / cities in Indonesia with a sample of 30 regencies / cities in the Bangka Belitung Islands Province. Regencies / Cities in the Bangka Belitung Islands Province use the purposive sampling method. The analytical method used in this study uses multiple linear regression analysis with the SPSS program. The results of this study indicate that there is a positive effect of legislative measures on the level of mandatory disclosure of Regional Government Financial Statements. There is a negative influence of audit findings on the level of mandatory disclosure of Regional Government Financial Statements. There is no influence between the Number of SKPD, Government Size, Regional Wealth to the level of mandatory disclosure of Regional Government Financial Statements.

Keywords: Legislative Size, Number of SKPD, Government Size, Regional Wealth, Audit Findings, the level of mandatory disclosure of Regional Government Financial Statements.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan atau *good government governance* adalah suatu hal yang menjadi perhatian utama bagi sektor publik terkhusus lembaga-lembaga pemerintah saat ini. Tata kelola pemerintah yang baik diwujudkan melalui cara pemerintah dalam melaksanakan kewenangan di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa perwujudan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah itu sendiri yang pada Undang-Undang sebelumnya hampir keseluruhan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Banyaknya tuntutan dari masyarakat mengharuskan lembaga Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi, akibatnya diperlukan tata kelola pemerintah yang baik.

Upaya untuk menciptakan *good governance* sehingga tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui bentuk tanggung jawab berupa laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap Pemerintahan yaitu pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, diharuskan membuat laporan keuangannya.

Laporan keuangan merupakan laporan atas pertanggung jawaban Pemerintah dalam penggunaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan menjadi suatu dasar yang penting bagi pengguna dalam pengambilan keputusan, sehingga adapun Laporan Keuangan akhir yang digunakan oleh pengguna adalah Laporan Keuangan yang telah melewati proses yang telah ditentukan. Hal tersebut adalah bahwa Laporan Keuangan dibentuk harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang sah. Selanjutnya, Laporan Keuangan dilaporkan kepada DPR/DPRD dan masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengungkapan Laporan Keuangan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan bersifat sukarela (*Voluntary Disclosure*) (Yulianingtyas, 2010). Pengungkapan yang dilakukan dengan mengikuti peraturan dari pihak yang berwenang disebut dengan pengungkapan wajib dengan tujuan untuk membentuk akuntabilitas dan transparansi dari keuangan publik.

Untuk menunjang terbentuknya Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai kaidah atau panduan dalam membentuk Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, setiap Laporan Keuangan Pemerintah harus disusun sesuai dengan kaidah di dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Dilihat dari peneliti sebelumnya, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pembentukan Laporan Keuangan di Indonesia belum dapat dikatakan tinggi, yaitu rata-rata sebesar 52,09% Syafitri (2012) dan Khasanah (2014)

sebesar 57%. Berlandaskan data tersebut, menandakan setiap Pemerintah Daerah di Indonesia secara keseluruhan tidak memenuhi syarat pengungkapan Laporan Keuangan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat yang membutuhkan informasi, karena penelitian ini salah satu bentuk ukuran dalam mengkaji tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum maksimal dan diharapkan dapat menjadi keputusan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengungkapan Laporan Keuangan.

Terbatasnya informasi tentang Laporan Keuangan Pemerintah menjadi salah satu alasan adanya penelitian ini. Dalam penelitian ini pengungkapan bersifat wajib (*Mandatory Disclosure*). Penelitian ini diupayakan dapat menjadi penjelasan atas tidak konsistennya hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian (Yulianingtyas, 2010; Syafitri, 2012; Khasanah, 2014; Maulana, 2015; Albab, 2015; Rahmayanti, 2018) yang melihat aspek yang memengaruhi pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil tersebut belum relatif sama.

Terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), namun yang kerap digunakan adalah ukuran Pemerintah Daerah, kekayaan daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan beberapa lainnya. Menurut Syafitri (2012) ukuran Pemerintah Daerah yang diprosikan dengan total aset berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian tersebut ini didukung oleh

penelitian Yulianingtyas (2010) dan Rahmayanti (2018), di mana jumlah aset yang besar tidak memengaruhi tingkat pengungkapan. Namun berbeda dengan penelitian Maulana (2015) dan Albab (2015), yang menyebutkan adanya pengaruh positif antara ukuran Pemerintah Daerah terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

Acuan utama penelitian ini adalah penelitian Rahmayanti (2018). Hal tersebut dikarenakan bahwa penelitian Rahmayanti merupakan penelitian yang paling baru dan variabel-variabel yang digunakan lebih kompleks dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian oleh Yulianingtyas (2010), Syafitri (2012), Khasanah (2014) dan Maulana (2015). Variabel yang digunakan Rahmayanti (2018) lebih beragam sehingga menghasilkan jawaban yang lebih kompleks. Berbeda dengan Rahmayanti (2018), adanya penambahan variabel oleh peneliti yaitu menambahkan ukuran legislatif diproksi kompleksitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018. Alasan dipilihnya Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai populasi penelitian, dikarenakan Provinsi ini merupakan Provinsi yang baru berdiri pada tahun 2000, sehingga LKPD yang disajikan belum sesuai dengan item-item yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah terdapat peningkatan pengungkapan pada LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal tersebut yaitu masih adanya hasil yang bertentangan antara penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti ingin kembali menguji aspek-aspek yang memengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD dengan berjudulkan: **“Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2014-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pengaruh kekayaan Daerah (PAD) terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaruh jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Bagaimana pengaruh ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Bagaimana pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah tersebut, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari kompleksitas pemerintah, dan temuan audit

terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Untuk tujuan perluasan teori dan pengetahuan bidang akuntansi, terkhusus di bidang Akuntansi Pemerintahan yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai kajian untuk mengukur angka dari tingkat pengungkapan yang dilaporkan yang sudah dilandaskan dengan SAP yang sah.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Sebagai kajian untuk pemerintah sebagai dasar penilaian apakah termasuk *punishment* atau *reward* untuk menunjang tingkat pengungkapan wajib sesuai SAP yang sah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pemacu peneliti berikutnya untuk mengkaji beragam faktor lain tentang dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, dan sebagai salah satu rujukan untuk penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menerangkan teori-teori terkait dengan penelitian, variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan penentuan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menerangkan populasi penelitian, sumber data, metode pengambilan data, dan alat uji yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan menerangkan hasil penelitian, dan analisis data terkait pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menerangkan kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud dari komitmen (*Stewardship*) manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dilimpahkan kepada mereka. Teori *Stewardship* adalah teori yang menyebutkan bahwa tidak adanya kepentingan pribadi yang terlibat di dalam manajemen. Dengan adanya teori tersebut, maka dapat mendukung adanya *Good Governance*, melalui pembuatan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan. Untuk mencapai hal tersebut pengungkapan harus diungkapkan secara jelas dan rinci mengenai informasi akuntansi dan informasi lain yang terkait.

Teori utama dalam penelitian adalah teori *Stewardship*, karena teori ini lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi hubungan di sektor publik. Berdasarkan teori ini, manajer akan bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Menurut Raharjo (2007) ketika kepentingan *steward* dan pemilik sama, maka *steward* akan berusaha bekerja sama untuk memenuhi keinginan pemilik, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih berfokus untuk mencapai

tujuan organisasi. Sehingga teori ini dikatakan lebih sesuai untuk menggambarkan kondisi dalam sektor publik.

Menurut Raharjo (2007) *Stewardship* merupakan teori yang menjelaskan kondisi para penerima amanah (manajer) tidak terdorong oleh tujuan pribadi seperti materi dan uang, tetapi lebih mengedepankan kepentingan organisasi. Teori ini memiliki asumsi bahwa manajer akan meluruskan tujuan organisasi sesuai dengan tujuan pemilik. Pemberi amanah (*Principal*) akan berusaha memaksimalkan kekayaan organisasi untuk memaksimalkan fungsi yang ada. Dalam artian, adanya kepercayaan atas sifat dasar manusia membuat adanya hubungan antara pemberi amanah (*principal*) adalah rakyat dan penerima amanah (*steward*) yaitu Pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki informasi penuh dan memiliki rasa tanggung jawab atas jaminan yang telah diberikan rakyat, sadar bahwa pemerintah memiliki keharusan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Langkah Pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dengan menjadi pegawai pemerintah yang amanah agar dapat terpilih kembali dalam pemilu selanjutnya.

2.1.1 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengungkapan adalah satu rangkaian pada laporan keuangan yaitu menyajikan informasi ke dalam bentuk laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan harus lengkap dan rinci. Menurut Ghozali & Chariri (2007), pengungkapan Laporan Keuangan berdasarkan standar dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Mandatory Disclosure adalah suatu eksposur minimal yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi di Indonesia. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Keputusan Nomor 17/PM/2002 atau VIII..G.7 merupakan peraturan terkait pengungkapan informasi di dalam Laporan Keuangan. Dalam praktiknya, konsep yang paling umum digunakan adalah pengungkapan bersifat cukup (*Adequate Disclosure*) yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang sah.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh standar akuntansi. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang sah.

2.1.3 Kekayaan Daerah

Menurut Sinaga dalam Syafitri (2012), kekayaan daerah merupakan salah satu bentuk dari kemakmuran di suatu daerah. Kekayaan daerah diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang penerimaannya terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002). PAD akan masuk ke dalam Kas Penerimaan Daerah.

2.1.4 Ukuran Pemerintah

Total aset diprosikan sebagai ukuran pemerintah. Menurut Yulianingtyas (2011), dan Syafitri (2012) ukuran daerah dapat ditentukan oleh besarnya aset yang dimilikinya. besarnya aset yang dimiliki suatu daerah menentukan ukuran daerah tersebut.

Ukuran Pemerintah juga dapat dilihat dari penjualan dan kapitalisasi pasar. Hal-hal tersebut dapat menjadi acuan untuk menghitung besar ukuran suatu Pemerintah Daerah. Semakin tinggi penjualan maka perputaran uang akan meningkat dan meningkatkan nilai aset, sehingga penjualan dapat menjadi acuan ukuran Pemerintah dengan melihat dari total aset Pemerintah Daerah.

2.1.5 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan pusat pertanggung jawaban di lingkungan Pemerintah yang berperan sebagai pengguna anggaran/barang. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa SKPD merupakan organisasi daerah yang berperan sebagai pengguna anggaran/barang di Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, yang termasuk

kedalam SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit, dan lain-lain.

Wewenang atas penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah selaku pemangku kekuasaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Atas kuasa tersebut, Kepala Daerah menyalurkan kekuasaan tersebut kepada setiap satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan dijalankan oleh SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/barang.

2.1.6 Ukuran Legislatif

Perwakilan rakyat yang berperan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBD, dan kebijakan Pemerintah. Hal ini menjadikan DPRD berperan dalam mengontrol kebijakan keuangan daerah. Oleh sebab itu pengendalian keuangan daerah diharapkan dapat meningkat seiring meningkatnya kuantitas anggota legislatif agar dapat berperan meningkatkan upaya untuk mengeksposur informasi akuntansi berdasarkan SAP.

2.1.7 Temuan Audit

Kepercayaan publik terhadap keandalan laporan keuangan bergantung pada validasi oleh auditor independen. Agar laporan keuangan

pemerintah terpercaya kualitas transparansi dan akuntabilitasnya maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Bentuk dari pemeriksaan BPK berupa opini audit, temuan audit, dan rekomendasi.

Temuan audit adalah segala perkara pelanggaran ketentuan dari pengendalian internal ataupun perundang-undangan yang berlaku yang ditemukan oleh BPK. Dengan adanya temuan ini, BPK akan menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi atas temuan-temuan dan lebih meningkatkan pengungkapannya. Besarnya jumlah temuan akan meningkatkan permintaan pengungkapan yang akan dianjurkan oleh BPK.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengungkapan LKPD sudah mulai banyak diteliti. Khasanah (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD pada Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah LKPD di Provinsi Jawa Tengah dengan Tahun anggaran 2010-2012. Variabel independen yang digunakan adalah Karakteristik Pemerintah (kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, umur Pemerintah Daerah), Kompleksitas Pemerintah (jumlah SKPD, ukuran legislatif) dan temuan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya variabel karakteristik Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan aset daerah yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD, sedangkan karakteristik Pemerintah Daerah yang diproksi dengan lainnya memiliki pengaruh negatif. Variabel kompleksitas berpengaruh

negatif terhadap pengungkapan LKPD, hal ini sama dengan variabel temuan audit yang berpengaruh negatif terhadap pengungkapan LKPD.

Tahun berikutnya juga dilakukan penelitian oleh Maulana & Handayani (2015) untuk melihat pengaruh karakteristik, kompleksitas dan temuan audit terhadap pengungkapan LKPD dengan Sampel 78 Laporan Keuangan Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Penulis menemukan bahwa variabel karakteristik Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan ukuran pemda memiliki pengaruh positif dan kemandirian daerah dan *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif. Begitu juga dengan variabel kompleksitas pemerintah yang diproksi dengan jumlah SKPD memiliki pengaruh negatif dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif, dan variabel temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Pada tahun yang sama Pratama (2015) juga meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010 – 2013. Hasil analisis menyebutkan variabel kompleksitas yang diproksikan dengan banyaknya penduduk, ukuran Pemerintah Daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Waliyyani & Amir Mahmud (2015) dengan populasi yang digunakan adalah seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2013 dengan sampel berjumlah 542. Variabel independen yang digunakan adalah Karakteristik Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan *Size*,

Umur Pemerintah Daerah, Temuan Audit, *Leverage*, dan *Intergovernmental revenue*. Peneliti menemukan bahwa variabel karakteristik pemerintah yang diprosikan dengan *Size*, Temuan Audit, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia, dan yang diprosikan dengan Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Ernawati (2016) dengan menggunakan ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, umur Pemerintah Daerah, dan temuan audit sebagai variabel independen. Populasi dan sampel yang digunakan adalah 35 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2014. Sebanyak empat variabel yang digunakan, variabel ukuran Pemerintah Daerah, jumlah SKPD, dan umur Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang menyebutkan bahwa jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Ayu Rahayu (2016) juga melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun anggaran 2013-2015. Dalam penelitiannya, Ayu menambahkan satu variabel sebagai variabel pemoderasi yaitu variabel Sistem Pengendalian Internal. Hasil analisis menyebutkan bahwa variabel karakteristik pemda yang diprosikan

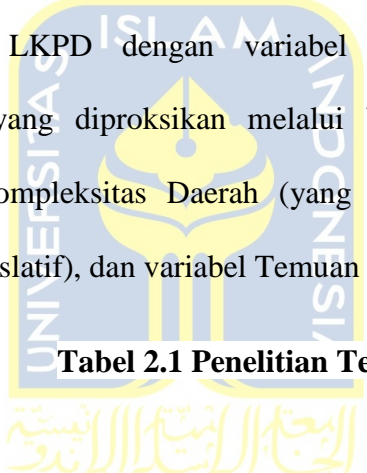
dengan tingkat kemandirian berpengaruh negatif, dan yang diproksikan dengan ukuran pmda memiliki pengaruh positif, variabel kompleksitas daerah berpengaruh positif dan variabel temuan audit berpengaruh negatif. Variabel *moderating* SPI memiliki pengaruh negatif sebagai variabel *moderating* antara tingkat kemandirian dan pengungkapan LKPD, sedangkan SPI memiliki pengaruh positif terhadap variabel ukuran legislatif dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Fikrinah Naopal, Sri Rahayu (2017) juga melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Penelitian ini menambah variabel baru dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu Opini Audit. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel karakteristik daerah yang diproksikan dengan umur Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif, dan yang diproksikan dengan ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negatif. Variabel temuan audit dan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif, dan variabel opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Penelitian terbaru terkait faktor-faktor pengungkapan LKPD dilakukan oleh Amin (2017) dengan sampel laporan keuangan Kota/Kabupaten se-Jawa Timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Variabel independen yang digunakan adalah karakteristik pemerintah yang diproksikan dengan kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset dan umur Pemerintah Daerah, kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan jumlah SKPD dan ukuran legislatif dan temuan audit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel

PAD, DEPEMD, LEG, SKPD, AGE dan temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan, sedangkan variabel ASSET berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan (DISC).

Beberapa penelitian untuk variabel temuan audit, Karakteristik Pemerintah Daerah dan kompleksitas daerah masih terdapat inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti kembali tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib LKPD dengan variabel independen yaitu variabel karakteristik daerah (yang diproksikan melalui Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah), Kompleksitas Daerah (yang diproksikan melalui Jumlah SKPD dan Ukuran Legislatif), dan variabel Temuan Audit.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Penulis dan Tahun | Variabel Terkait | Metode Penelitian | Temuan Kajian |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Nur Lailatul Khasanah (2014) | Karakteristik Pemerintah (Kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, umur Pemerintah Daerah), Kompleksitas Pemerintah (Jumlah | Data yang digunakan dalam penelitian ialah data panel yang merupakan gabungan antara data time series tahunan selama | Variabel karakteristik pemerintah (kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, aset daerah, dan umur pemerintah daerah) |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>SKPD, Ukuran legislatif), dan temuan audit.</p> | <p>3 tahun (2010-2012) dan data cross section berupa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Analisis regresi data panel memiliki tiga bentuk yaitu: Pooled Least Square, Fixed Effect Model dan Random Effect Model.</p> <p>Pengujian dalam penelitian ini menggunakan software Eviews versi 7.0.</p> | <p>hanya variabel aset daerah yang berpengaruh positif, sedangkan kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, dan umur Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Variabel kompleksitas (Jumlah SKPD, ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Begitu juga dengan variabel temuan audit yang berpengaruh negatif terhadap tingkat</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | pengungkapan LKPD. |
| Candra Maulana & Bestari Dwi Handayani (2015) | Karakteristik pemerintah yang diproksikan dengan ukuran pemda, kemandirian daerah dan intergovernmental revenue serta kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan jumlah SKPD dan ukuran legislatif ditambah dengan temuan audit. | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa sebanyak 123 populasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah, kabupaten, dan kota pada tahun 2013. Teknik pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah analisis statistik | Karakteristik pemerintah yang diproksi dengan ukuran pemda berpengaruh positif, sedangkan yang diproksi dengan kemandirian dan intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Variabel kompleksitas pemerintahan yang diproksi dengan jumlah SKPD berpengaruh negatif dan yang diproksi |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| | | deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 21. | dengan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dan variabel temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. |
| Kadek Aris Dwi Pratama (2015) | Kompleksitas Pemerintah Daerah, diproksikan dengan Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja | Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD kabupaten/kota di provinsi Bali periode 2010-2013. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik <i>non-probability</i> dengan cara <i>purposive sampling</i> . Metode | variabel kompleksitas Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan jumlah penduduk, ukuran Pemerintah Daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap peLaporan Keuangan Pemerintah Daerah. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>pengujian hipotesis yang digunakan adalah regresi logistik dengan bantuan dari program <i>Statistical Package for Social Science (SPSS)</i></p> | |
| <p>Ghaniyyu Mintotik Waliyyani ,Amir Makhmud (2015)</p> | <p>Variabel independen dalam penelitian ini adalah Karakteristik Pemerintah Daerah yang diprosikan dengan Size, Umur Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Leverage, dan Intergovernmental revenue. Variabel dependen adalah tingkat pengungkapan LKPDdi Indonesia.</p> | <p>Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sebanyak 542 populasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2013. Teknik pengambilan sampel adalah metode <i>purposive sampling</i>. Metode pengumpulan</p> | <p>Hasil analisis adalah variabel karakteristik pemerintah yang diprosikan dengan <i>Size</i>, Temuan Audit, <i>Leverage</i>, dan <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPDdi Indonesia, dan yang diprosikan dengan Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif</p> |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|---|
| | | <p>data dengan menggunakan metode dokumentasi berupa data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan SPSS 21.</p> | <p>terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> |
| <p>Tika Ernawati (2016)</p> | <p>ukuran Pemerintah Daerah, jumlah SKPD, Umur Pemerintah Daerah, dan Temuan audit</p> | <p>Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 35 daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2014. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel</p> | <p>Berdasarkan hasil analisis, variabel ukuran Pemerintah Daerah, jumlah skpd, dan umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan</p> |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| | | <p>adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian individu dari peneliti terkait sampel yang memenuhi persyaratan.</p> | <p>LKPD, sedangkan temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> |
| <p>Ayu Rahayu (2016)</p> | <p>ukuran pemda, tingkat kemandirian daerah sebagai proksi dari karakteristik pemda, ukuran legislatif sebagai proksi dari kompleksitas, temuan audit</p> | <p>Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD di Sulawesi Selatan periode tahun 2013-2015 yang telah diaudit oleh BPK. Teknik yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah teknik <i>Purposive sampling</i>. Metode analisis data yang digunakan</p> | <p>Variabel karakteristik pemda yang diproksikan dengan tingkat kemandirian berpengaruh negatif, dan yang diproksikan dengan ukuran pemda berpengaruh positif, variabel kompleksitas daerah yang diproksi dengan ukuran legislatif</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>dalam penelitian ini di antaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji normalitas, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS</p> | <p>berpengaruh positif dan variabel temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Variabel moderating SPI berpengaruh negatif sebagai variabel moderating antara tingkat kemandirian dan pengungkapan LKPD, sedangkan SPI berpengaruh positif terhadap variabel ukuran legislatif dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> |
|--|--|---|---|



| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Naopal, Fikrinah, Sri Rahayu, and Siska Priyandani Yudowati (2017)</p> | <p>Karakteristik daerah (ukuran pemerintahan, umur pemerintahan), jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit.</p> | <p>Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD(LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh mendapatkan sampel sejumlah 27 LKPD dari jumlah total sebesar 54 LKPD di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis dari statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.</p> | <p>Variabel karakteristik daerah yang diukur melalui ukuran pemerintah berpengaruh negatif, dan yang diukur melalui umur pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Variabel temuan audit dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pengungkapan LKPD, serta variabel opini audit berpengaruh positif pengungkapan LKPD.</p> |
|--|---|---|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Meli Marliani , Moh. Amin, M. Cholid Mawardi (2018)</p> | <p>Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik pemerintah (kekayaan daerah/PAD, tingkat ketergantungan, total aset, umur Pemerintah Daerah), kompleksitas pemerintah (jumlah SKPD, ukuran legislatif), dan temuan audit.</p> | <p>Populasi dalam hal penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dari kota/kabupaten di Jawa timur pada tahun 2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersumber dari BPK RI. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Metode analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan</p> | <p>Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, DEPEND, LEG, SKPD, AGE, dan Audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan, sedangkan variabel ASET berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan (DISC).</p> |
|---|--|---|--|

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| | | alat uji SPSS 21. | |
|--|--|-------------------|--|

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kekayaan Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Berdasarkan teori *Stewardship* menjelaskan bahwa manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu sebagai sasaran utama melainkan untuk kepentingan organisasi, maka Pemerintah Daerah selaku *steward* akan berusaha menunjukkan kinerjanya dengan menghasilkan kekayaan dan sumber daya yang besar. Semakin besarnya kekayaan daerah yang diprosikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan motivasi bagi Pemerintah untuk melakukan pengungkapan dengan lebih baik. Menurut Khasanah (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dengan meningkatnya kekayaan daerah dapat diikuti dengan tingginya tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 = Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

2.3.2 Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Ukuran Pemerintah Daerah menggambarkan besarnya suatu Pemerintahan tersebut. Besarnya suatu pemerintahan menandakan adanya sumber daya yang lebih besar, yaitu aset. Aset dapat menjadi proksi untuk ukuran pemerintahan. Semakin besar jumlah aset maka diperlukan pemeliharaan aset yang baik dan dibutuhkan pengungkapan yang lebih.

Besarnya ukuran pemerintah dapat berdampak terhadap tingginya tekanan agar pemerintah dapat mengungkapan pengelolaan sumber daya tersebut secara lengkap kepada publik. Hal ini didukung oleh penelitian Khasanah (2014) yang menyatakan ukuran Pemerintah Daerah dapat menaikkan tingkat pengungkapan LKPD.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 = Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

2.3.3 Jumlah SKPD Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan gambaran diferensiasi fungsional dalam lingkungan pemerintahan. SKPD berperan sebagai pusat pertanggung jawaban pengguna

anggaran/barang. Jumlah SKPD menunjukkan adanya kepentingan yang diprioritaskan untuk membangun daerah. Semakin besar jumlah SKPD suatu daerah, maka semakin banyak kepentingan dari Pemerintah Daerah yang diikuti dengan semakin besar penggunaan anggaran/barang. Besarnya jumlah SKPD suatu Pemerintah Daerah akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan yang lebih kompleks.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 = Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

2.3.4 Ukuran Legislatif Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

DPRD sebagai perwakilan dari rakyat berfungsi untuk mengawasi kinerja Pemerintah Daerah. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan UU, APBD, dan kebijakan Pemerintah. Dengan adanya pengawasan, diharapkan mendorong Pemerintah untuk melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini juga terjadi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah diharapkan meningkat seiring adanya peningkatan anggota legislatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2012) yang

menemukan bahwa semakin banyak jumlah anggota legislatif maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 = Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

2.3.5 Temuan Audit Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

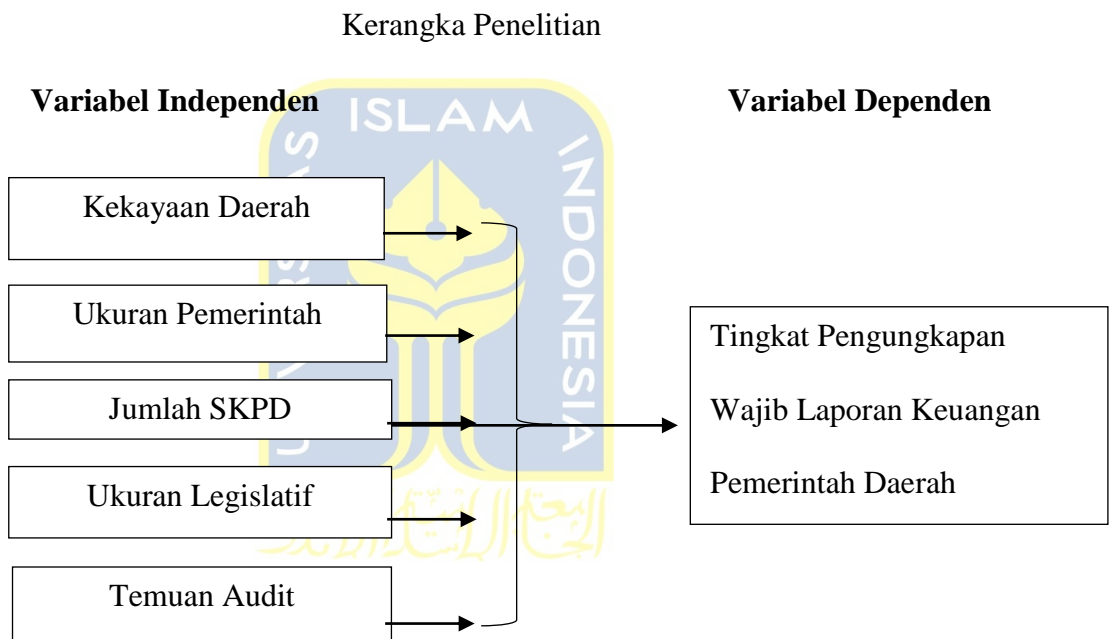
Temuan audit adalah penemuan oleh BPK yang terdiri atas persoalan-persoalan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan pengendalian internal. Adanya temuan ini, menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan perbaikan. Sehingga, semakin banyak temuan audit maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan suatu Pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) yang menyebutkan bahwa semakin banyak temuan audit, maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan hal ini dikarenakan adanya upaya perbaikan atas temuan audit yang ditemukan oleh BPK dan menunjukkan pada publik bahwa adanya perbaikan kualitas yang dilakukan Pemerintah Daerah atas saran dari BPK. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 = Temuan Audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penjelasan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai populasi penelitian. Dari populasi tersebut, akan dipilih sampel dengan metode *purpose sampling*, yaitu penentuan sampel sesuai dengan dasar-dasar penilaian oleh peneliti.

Dasar-dasar penentuan sampel terdiri dari :

- a. LKPD Kabupaten/Kota pada tahun 2014 – 2018 yang telah diaudit oleh BPK.
- b. Menyajikan empat komponen LKPD yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Menyajikan jumlah SKPD Pemerintahan selaku entitas akuntansi di tahun 2014-2018 pada LKPD atau Laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian internal.

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah suatu objek yang diukur dalam penelitian. Terdapat 2 jenis variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Kekayaan daerah, ukuran Pemerintah, jumlah SKPD,

ukuran legislatif, dan temuan audit dipilih sebagai variabel independen dalam penelitian ini dan tingkat pengungkapan wajib dipilih sebagai variabel independen.

3.2.1 Variabel bebas (independen)

Variabel independen merupakan jenis variabel yang tidak terikat yang memengaruhi variabel lainnya. Berikut adalah penjelasan dari setiap variabel independen :

3.2.1.1 Kekayaan Daerah (PAD)

Kekayaan daerah merupakan hal yang penting di dalam Pemerintahan. Salah satu ukuran yang paling dapat menggambarkan kekayaan adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD terhadap kekayaan daerah mungkin tidak begitu besar, namun PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri tanpa kontribusi dari pihak lain. Penelitian yang menjadi acuan untuk mengukur kekayaan daerah menggunakan PAD adalah penelitian Rahmayanti (2018), karena pengukuran dengan penelitian ini mengubah bentuk kekayaan daerah yang mencapai satuan miliar, ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural agar data yang diolah menjadi normal.

Perhitungan kekayaan daerah yang diproksikan dengan PAD adalah sebagai berikut :

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Ln (PAD)}$$

3.2.1.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan besarnya ukuran suatu entitas. Ukuran pemerintah dapat digambarkan melalui beberapa hal seperti yang disebutkan oleh Khasanah (2014) yaitu total aset, kapitaliasi penjualan, dan kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini ukuran pemerintah digambarkan dengan total aset suatu pemerintah. Total aset dianggap sebagai gambaran ukuran pemerintah ialah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari kejadian masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa mendatang yang diperoleh.

Penelitian utama yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur ukuran Pemerintah Daerah adalah penelitian oleh Syafitri (2012) karena pengukuran dengan penelitian ini mengubah bentuk total aset yang dapat mencapai satuan miliar atau triliunan, ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural agar data yang diolah tidak terdapat permasalahan dan dapat dihitung bersamaan dengan variabel lainnya.

Perhitungan ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aset adalah sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Pemerintah} = LN(\text{total aset})$$

3.2.1.3 Jumlah SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kesatuan yang bertugas menjalankan fungsi selaku pengguna anggaran/barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa SKPD adalah suatu organisasi pada Pemerintahan yang bertugas dalam pengelolaan anggaran, kekayaan, dan kewajiban untuk melaksanakan fungsi akuntansi dan membentuk laporan keuangan sebagai bentuk penyelenggaraan akuntansi. Penelitian ini mengacu kepada penelitian Widanti (2019) yang mengukur SKPD dengan menggunakan jumlah keseluruhan SKPD di suatu Pemerintahan.

Perhitungan jumlah SKPD adalah sebagai berikut :


$$\text{SKPD} = \text{Jumlah SKPD}$$

3.2.1.4 Ukuran Legislatif

Ukuran legislatif digambarkan melalui jumlah anggota DPRD, karena anggota DPRD adalah perwujudan dari legislatif suatu Pemerintahan. Penelitian dengan menggunakan anggota DPRD sebagai anggota legislatif telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016).

DPRD selaku mandat dari rakyat memiliki fungsi pengawasan dalam Pemerintahan, khususnya pengawasan terkait

keuangan daerah. Dengan adanya fungsi ini, diharapkan semakin besar ukuran legislatif dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Perhitungan ukuran legislatif adalah sebagai berikut :

$$\text{Legislatif} = \text{Jumlah anggota DPRD}$$

3.2.1.5 Temuan Audit

Temuan audit adalah permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari pemeriksaan BPK terkait pelanggaran terhadap standar atau peraturan yang berlaku. Temuan audit dapat diukur dari banyaknya temuan audit oleh BPK yang dicantumkan di dalam laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal.

Perhitungan untuk temuan audit dapat diproksikan dengan:

$$\text{Temuan} = \text{Jumlah temuan Audit}$$

3.2.2 Variabel terikat (dependen)

Variabel terikat (dependen) ialah variabel yang bersifat mengikat dan dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014-2018.

3.2.2.1 Tingkat pengungkapan LKPD

Tingkat pengungkapan (LKPD) menunjukkan seberapa besar informasi yang telah diungkapkan dalam LKPD dibandingkan dengan yang semestinya diungkapkan berdasarkan item pengungkapan dalam SAP. Perbandingan ini menunjukkan besarnya tingkat pengungkapan berdasarkan LKPD yang telah disajikan oleh Pemerintah Daerah.

Perhitungan tingkat pengungkapan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pengungkapan} = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam SAP}}$$

Tingkat pengungkapan diukur dengan membandingkan pengungkapan dalam LKPD dan pengungkapan dalam SAP. Membandingkan dua pengungkapan tersebut digunakan sistem *scoring* yaitu sistem penilaian dengan memberi skor dari daftar *checklist* yang berisi pengungkapan yang diharuskan oleh SAP. Penelitian yang dijadikan sebagai acuan untuk pengungkapan ini adalah penelitian dari Rahmayanti (2018) dengan alasan karena pengungkapan yang dilakukan dianggap dapat menggambarkan item-item yang semestinya diungkapkan yang berjumlah 185 butir.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian atau istilah lainnya disebut dengan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak bersumber dari peneliti langsung namun data diambil dari sumber yang sudah ada. Data yang digunakan adalah data dari BPK berupa LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014-2018.

3.4 Metode Analisis Data

Data penelitian ini merupakan gabungan dari *time series* selama 5 tahun (2014-2018) dengan data *cross section* yaitu LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan ringkasan data data penelitian untuk memberikan gambaran terkait variabel dalam penelitian. Alat yang digunakan pada uji deskriptif adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minum, dan lain-lainnya.

Uji statistik deskriptif hanya sebatas menyampaikan informasi atau gambaran data penelitian tanpa adanya kesimpulan dari uji tersebut. Statistik deskriptif akan menyajikan dalam bentuk

yang sudah diringkaskan, rapi, dan dapat menjadi informasi dari sekumpulan variabel yang ada.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian untuk menilai apakah terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa asumsi yang harus dilengkapi di antaranya adalah: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji penyebaran data apakah berdistribusi normal atau tidak. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Syarat untuk memenuhi uji normalitas adalah nilai (K-S) memiliki angka probabilitas di atas $\alpha = 5\%$.

2. Uji Multikolinieritas

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menguji terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk melihat multikolinieritas dengan angka *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut adalah kriteria penilaian uji multikolinieritas :

- a. Apabila angka VIF > 10 atau nilai *tolerance* $< 0,1$ maka terjadi multikolinearitas.
- b. Apabila angka VIF < 10 atau nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan melihat apakah terdapat ketidaksamaan antar *variance error* dalam suatu model regresi. Heteroskedastisitas terjadi ketika penyebaran titik data populasi pada bidang regresi tidak konstan. Apabila terdapat kesamaan *variance* maka kondisi tersebut disebut dengan homoskedastisitas, kondisi ini dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Alat uji heteroskedastisitas adalah uji *gletser* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Apabila hasil pengujian lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka terdapat heteroskedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini akan digunakan model regresi berganda untuk analisis data. Analisis regresi berganda adalah analisis yang menghitung pengaruh antara dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Untuk melihat keabsahan dari prediksi pengujian regresi, maka dilakukan pencarian nilai yaitu uji koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan (Ghozali & Chariri, 2007).

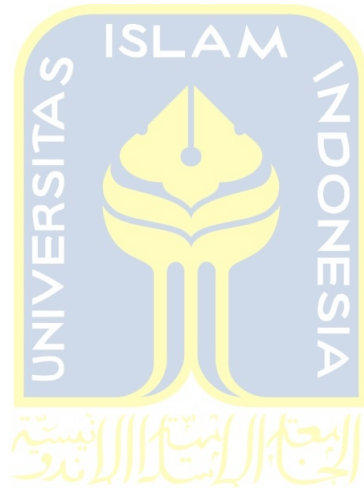
3.4.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan penilaian terhadap kemampuan model regresi variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Sederhananya koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Kemampuan variabel-variabel independen terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen apabila nilai R^2 kecil atau mendekati nol. Semakin nilai R^2 menuju satu maka variabel-variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji statistik t adalah uji yang mengukur pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini membandingkan angka dari t hitung dengan t tabel. Nilai signifikansi ujian ini adalah $\alpha=5\%$. Apabila t hitung $>$ t tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t hitung $<$ t tabel maka H_a ditolak dan H_o diterima, yang berarti variabel

independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, ukuran Pemerintah Daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif, dan temuan audit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 LKPD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang menggambarkan kekayaan daerah, total aset yang menggambarkan ukuran Pemerintah Daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan temuan audit. Kemudian dipilih 30 sampel berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Setiap data tersebut tercantum di dalam LKPD Kabupaten/Kota. Tingkat pengungkapan akan dihitung sesuai dengan jumlah pengungkapan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

4.1 PEMILIHAN SAMPEL

Populasi dari Penelitian ini adalah LKPD Kabupaten/Kota pada periode 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yang menunjukkan bahwa sampel akan dipilih sesuai dengan dasar-dasar penentuan (Yulianingtyas, 2010). Dasar-dasar penentuan tersebut antara lain, LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyajikan data jumlah SKPD, dan menyediakan secara lengkap laporan keuangan. Jumlah Kabupaten/Kota di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1 Kota dan 6 Kabupaten, dengan laporan keuangan periode 2014-2018. Dari 35 LKPD Kabupaten/Kota terdapat 2 laporan keuangan yang menyajikan tidak lengkap dan 32 laporan keuangan menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Dari 35 laporan keuangan tersebut yang memenuhi kriteria penelitian adalah 30 laporan keuangan. Berikut uraian perhitungan jumlah sampel :

Tabel 4.1 Dasar-dasar penentuan Sampel Penelitian

| Dasar-dasar penentuan sampel | Total |
|--|--------------|
| LKPD tahun 2014-2018 yang telah diaudit oleh BPK | 35 |
| Tidak mencantumkan jumlah SKPD | (3) |
| Laporan keuangan yang disajikan tidak lengkap | (2) |
| LKPD yang memenuhi kriteria penelitian | 30 |

4.2 ANALISIS DESKRIPTIF

Dari populasi 35 LKPD diambil sampel sejumlah 30 LKPD Kabupaten/Kota, dari sampel tersebut didapatkan hasil statistik deskriptif untuk menggambarkan deskriptif sampel. Hasil dari statistik deskriptif sampel disampaikan melalui tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

| | <i>n</i> | <i>Minimum</i> | <i>Maximum</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Deviation</i> |
|-------------------|----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Kekayaan Daerah | 30 | Rp.30,734,330,3 98.88 | Rp.196,070,4 86,773 | Rp.108,138,0 13,549 | 0,45687 |
| Ukuran Pemda | 30 | Rp.118,529,254, 415,925 | Rp.1,121,392 ,638,145 | Rp.5,516,064 ,770,673.48 | 0,829 |
| Jumlah SKPD | 30 | 23 | 40 | 30,87 | 4,384 |
| Ukuran Legislatif | 30 | 25 | 30 | 26,17 | 2,151 |
| Temuan Audit | 30 | 4 | 15 | 7.6 | 2.699 |
| Pengungkapan | 30 | 0,45 | 0,64 | 0,575 | 0,0353 |
| | 30 | | | | |

Sumber : Output SPSS diolah 2020

1. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat pengungkapan LKPD adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif pada tabel menggambarkan nilai terendah dari tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Bangka Belitung adalah 45% dan nilai tertinggi tingkat pengungkapan adalah sebesar 64% apabila di rata-ratakan sebesar 57,50%. Dari nilai tersebut dapat dilihat terdapat peningkatan tingkat pengungkapan setiap tahun, namun terdapat penurunan di beberapa Kabupaten/Kota.

2. Kekayaan Daerah

Kekayaan Daerah dihitung dengan proksi dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbentuk jutaan atau miliaran sehingga harus diubah menjadi natural logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata sebesar Rp.108,138,013,549. Nilai PAD tertinggi adalah sebesar Rp196,070,486,773 dimiliki oleh Kabupaten Bangka, sedangkan nilai PAD terendah adalah sebesar Rp.30734,330,398.88 dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan.

3. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah dapat dihitung dengan proksi dari total aset di suatu daerah. Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 dikatakan bahwa total aset pemerintah rata-rata sebesar Rp.5,516,064,770,673.48. Nilai total aset tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp1,121,392,638,145. sedangkan nilai total aset terendah terdapat di Kabupaten Belitung sebesar Rp118,529,254,415,925.

4. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Satuan Kerja Perangkat daerah diukur berdasarkan total SKPD pada pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 4.2 menyebutkan rata-rata nilai jumlah SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota senilai 30,87 SKPD, dengan standar deviasinya adalah sebesar 4.384. Pemerintah Daerah dengan jumlah SKPD tertinggi terdapat pada Kabupaten Belitung,

dan Pemerintah Daerah dengan jumlah SKPD terendah adalah Kabupaten Belitung Timur.

5. Ukuran Legislatif

Variabel ukuran legislatif yaitu anggota DPRD diukur dengan banyaknya jumlah anggota DPRD yang ada di daerah Kabupaten/Kota tersebut. Tabel 4.2 dapat menunjukkan nilai terendah jumlah anggota DPRD Pemerintah Daerah adalah 25 dan nilai tertinggi sebesar 30 dengan rata-rata 26.17 dan standar deviasi sebesar 2.151. Nilai terendah adalah 25 menunjukkan bahwa daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD terkecil adalah Kabupaten Bangka Selatan, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung timur sedangkan Kabupaten. Kota yang memiliki jumlah anggota DPRD tinggi adalah Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka Tengah.

6. Temuan Audit

Temuan audit dihitung dari banyaknya temuan pada laporan hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tabel 4.2 menggambarkan rata-rata temuan audit di setiap LKPD Kabupaten/Kota adalah sebesar 7,6 temuan dan standar deviasi sebesar 2.699. Temuan audit paling rendah pada Kabupaten Belitung sebesar 4 temuan, sedangkan temuan audit paling tinggi terdapat pada LKPD Kota Pangkalpinang sebesar 15 temuan.

4.3 UJI ASUMSI KLASIK

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan asumsi klasik di dalam model regresi. Langkah-langkah

dalam uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi normal atau tidaknya penyebaran. Untuk menguji normalitas suatu penyebaran data digunakan alat uji yaitu *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Syarat untuk memenuhi uji normalitas adalah nilai (K-S) memiliki angka probabilitas di atas $\alpha = 5\%$.

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas :

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

| | | <i>Unstandardized Residual</i> |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,02753459 |
| | Absolute | ,095 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,086 |
| | Negative | -,095 |
| Test Statistic | | ,095 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

Sumber : Output SPSS diolah 2020

Nilai (K-S) ditunjukkan melalui nilai pada *Asymp Sig (2-tailed)* dari uji normalitas pada tabel 4.3 adalah sebesar 0,200 lebih besar dari nilai sig. Oleh sebab itu data tersebut dapat dilanjutkan untuk olah data selanjutnya karena uji normalitas telah dipenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menemukan korelasi antara variabel independen pada model regresi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan kriteria nilai $VIF < 10$ atau nilai *tolerance* $> 0,10$ agar tidak terdapat multikolinearitas.

Berikut adalah tabel hasil uji normalitas :

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|-------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Kekayaan Daerah | 0,639 | 1,564 |
| Ukuran Pemda | 0,714 | 1,400 |
| Jumlah SKPD | 0,744 | 1,343 |
| Ukuran Legislatif | 0,629 | 1,591 |
| Temuan Audit | 0,961 | 1,040 |

Sumber : Output SPSS diolah 2020

Tabel 4.4 menggambarkan angka VIF setiap variabel independen lebih kecil dari 10 tersebut menyebutkan bahwa

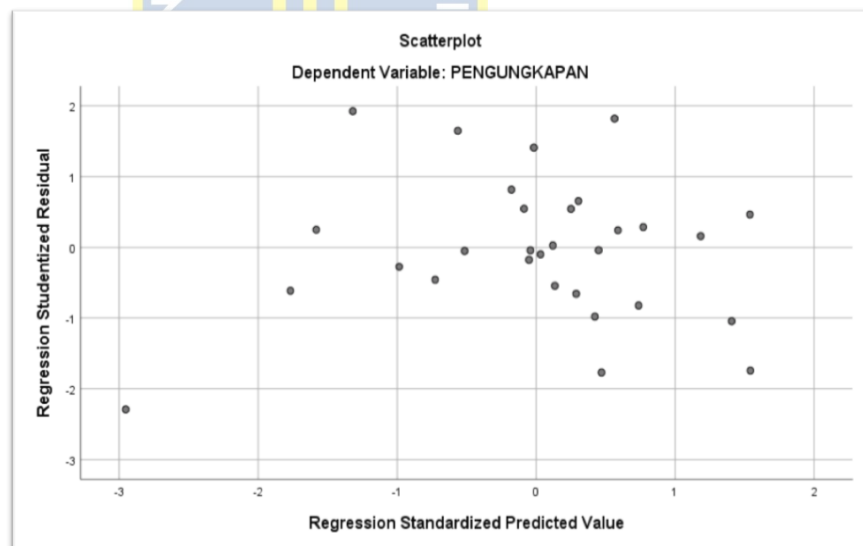
seluruh variabel independen pada penelitian ini mempunyai nilai $VIF < 10$. Tabel 4.4 juga menunjukkan angka *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,10. Berdasarkan angka VIF dan *tolerance* dapat dikatakan bahwa model regresi penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah varian dari *error* ada ketidaksamaan antar varian dalam suatu model regresi. Analisis yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah diagram *scatterplot*.

Berikut adalah diagram *scatterplot* hasil Uji Heteroskedastisitas :

Gambar 4.1



Sumber : Output SPSS diolah 2020

Gambar diagram di atas menunjukkan pola penyebaran data dalam penelitian ini tersebar, dapat dilihat dari titik-titik pada

diagram yang menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas dan menghasilkan data yang valid.

4.4 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh dari suatu variabel independen atas variabel dependen. Berikut tabel hasil perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda :

Tabel 4.5 Analisis Regresi Berganda

| Variabel | B | t | Sig |
|--|--------|--------|-------|
| (Constant) | 1,007 | 2.261 | 0.033 |
| Kekayaan Daerah | -0,021 | -1,355 | 0.188 |
| Ukuran Pemda | -0,001 | -0.183 | 0.857 |
| SKPD | 0,000 | 0,294 | 0,771 |
| Ukuran Legislatif | 0,007 | 2,079 | 0,048 |
| Temuan Audit | -0.007 | -3,498 | 0.002 |
| R = 0,392 | | | |
| Adj.R = 0,265 | | | |
| n = 30 | | | |
| Signifikan pada tingkat signifikansi α 5% atau 0,05 | | | |

Hasil perhitungan dari Analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 1,007 + 0,007X_1 + 0,000X_2 - 0,001X_3 - 0,02X_4 - 0,007X_5$$

Rumusan tersebut menggambarkan pengaruh variabel dependen (Y atau tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Penjelasan dari rumusan model regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konstanta dengan angka 1,007, menjelaskan apabila kondisi variabel independen bernilai nol, maka membentuk nilai pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,007.
2. Koefisien X_1 dengan angka 0,007, menjelaskan apabila kondisi variabel X_1 meningkat sebesar satu, maka akan menaikkan nilai dari Y sebanyak 0,007.
3. Koefisien X_2 dengan angka 0,000, menjelaskan apabila kondisi variabel X_2 meningkat sebesar satu, maka akan menaikkan nilai dari Y sebanyak 0,000.
4. Koefisien X_3 dengan angka -0,001, menjelaskan apabila kondisi variabel X_3 meningkat sebesar satu, maka akan menurunkan nilai dari Y sebanyak 0,001.

5. Koefisien X_4 dengan angka $-0,02$, menjelaskan apabila kondisi variabel X_4 meningkat sebesar satu, maka akan menurunkan nilai dari Y sebanyak $0,02$.
6. Koefisien X_5 dengan angka $-0,007$, menjelaskan apabila kondisi variabel X_5 meningkat sebesar satu, maka akan menurunkan nilai dari Y sebanyak $0,007$.

4.4.1 UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Uji koefisien determinasi merupakan penilaian variabel independen terkait kapasitasnya dalam menjelaskan variabel dependen dalam suatu model regresi. Berdasarkan uji tersebut, didapatkan nilai sebesar $0,265$, yang menandakan bahwa kapasitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar $2,65\%$ dan sisanya $97,35\%$ dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini.

4.5 UJI HIPOTESIS

Uji hipotesis ini menggunakan nilai signifikansi pada uji statistik t . Berikut adalah hasil analisis dari uji hipotesis :

1. Kekayaan Daerah Berpengaruh Terhadap Tingat Pengungkapan LKPD.

Berdasarkan tabel 4.5, nilai signifikansi dari kekayaan daerah (Pendapatan Asli Daerah) lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,188 > 0,05$ yang berarti bahwa

H1 ditolak dan menunjukkan Kekayaan Daerah Kabupaten/Kota tidak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan LKPD.

2. Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Berdasarkan tabel 4.5, nilai signifikansi dari ukuran Pemerintah Daerah (total aset) lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,857 > 0,05$, yang berarti bahwa H2 ditolak dan menunjukkan ukuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD.

3. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Berdasarkan tabel 4.5, nilai signifikansi dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,771 > 0,005$, yang berarti bahwa H3 ditolak dan menunjukkan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD.

4. Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Berdasarkan tabel 4.5, nilai signifikansi dari jumlah legislatif (anggota DPRD) lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,048 < 0,05$, yang berarti bahwa H4 diterima dan menunjukkan jumlah legislatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Temuan Audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Berdasarkan tabel 4.5, nilai signifikansi dari temuan audit lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi α . Nilai tersebut adalah $0,002 < 0,005$ dengan nilai signifikansi temuan audit bernilai negatif, yang berarti bahwa H_5 ditolak dan menunjukkan temuan audit berpengaruh negatif terhadap LKPD.

5.7 PEMBAHASAN

Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota yaitu ukuran Pemerintah Daerah, kekayaan daerah, jumlah Satuan kerja Perangkat Daerah, ukuran legislatif, dan temuan audit. Hasil pengujian dari variabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (H_3), ukuran Pemerintah Daerah (H_2), dan kekayaan daerah (H_1) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD Kabupaten/Kota, sedangkan ukuran legislatif (H_4) berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan wajib Laporan Keuangan Daerah Pemerintah. Pembahasan hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :

5.7.1 Kekayaan Daerah

Berdasarkan hasil analisis data, koefisien regresi negatif dari kekayaan daerah sebesar 0,021 dan nilai signifikansi sebesar 0,188 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 1

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa antara kekayaan Pemerintah Daerah dengan tingkat pengungkapan wajib LKPD tidak memiliki pengaruh di antaranya.

Hal ini didukung oleh penelitian Khasanah (2014) dan Yuliant (2017) yang juga menyebutkan bahwa ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai proksi dari kekayaan daerah, mendapat kontribusi paling besar dari Pendapatan Pajak dan Retribusi khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat atas kewajiban terhadap pajak dan retribusi dapat dikatakan masih rendah, sehingga tidak diikuti dengan peningkatan dalam pengungkapan LKPD yang sesuai dengan SAP. Hal ini juga berpengaruh dari Pemerintah Daerah yang masih bergantung dengan Pendapatan Transfer yang membuat pengelolaan dari PAD terhitung rendah.

5.7.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah dengan koefisien regresi negatif sebesar 0,001 dan nilai signifikansi sebesar 0,857 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh antara ukuran Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Syafitri (2012) dan Rahmayanti (2018) sependapat dengan hal ini, yang menyebutkan bahwa ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hal ini mungkin terjadi karena pencatatan yang dilakukan belum memadai. Meskipun aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah namun tidak dicatat dengan baik dapat menjadi kendala dalam melaporkannya. Besarnya ukuran Pemerintah yang dilihat dari total aset belum tentu menjadi pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD dikarenakan optimalisasi terhadap pengelolaan dan kontribusi yang masih kurang seperti pemeliharaan aset dan pencatatan yang belum baik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya ukuran pemerintah tidak menentukan peningkatan terhadap pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.7.3 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis data, koefisien regresi positif dari jumlah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah sebesar 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,771 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Daerah Pemerintah.

Rahmayanti (2018) dan Widanti (2019) menyatakan hal yang sama dengan penelitian ini, yang berpendapat bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut mungkin terjadi karena sifat penyusunan laporan yang dibentuk oleh SKPD merupakan kewajiban pokok sehingga dalam sistem pencatatannya tidak terjadi pembaharuan apabila terjadi perubahan peraturan tentang SAP sebagai contoh yaitu perubahan basis akuntansi yaitu basis kas menuju aktual.

Hubungan yang tidak signifikan antara jumlah SKPD dengan tingkat pengungkapan wajib LKPD ditunjukkan dari laporan pemeriksaan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan terdapat pengelolaan dan penata usaha keuangan SKPD yang masih belum memenuhi fungsi dengan mengikuti peraturan yang berlaku karena kurangnya sistem pengawasan terhadap laporan keuangan oleh aparat yang berwenang dalam hal pengawasan.

5.7.4 Ukuran Legislatif

Berdasarkan hasil analisis data, koefisien regresi positif dari ukuran legislatif adalah sebesar 0,007 dan nilai signifikansi sebesar 0,0048 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima. Sehingga, semakin besar ukuran legislatif dapat

mendorong Pemerintah Daerah dalam menaikkan tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Daerah Pemerintah.

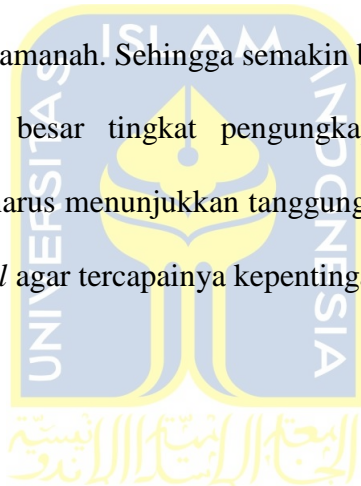
Hal ini sependapat dengan Syafitri (2012) dan Rahayu (2016) yang menyebutkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai wakil masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintah agar dapat berjalan mengikuti keinginan masyarakat dan memantau jalannya praktik dan LKPD agar mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 184 juga disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota DPRD dapat memberi dorongan yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk pengungkapan secara lengkap.

5.7.5 Temuan Audit

Berdasarkan hasil analisis data, koefisien regresi dari temuan audit menunjukkan arah negatif sebesar 0,007 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 5 ditolak. Berdasarkan hal tersebut

maka disimpulkan bahwa variabel temuan audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Khasanah (2014) yang menyebutkan bahwa adanya temuan audit menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan perbaikan atas temuan tersebut. Menurut teori *stewardship*, Pemerintah selaku *steward* harus memenuhi tanggung jawabnya kepada BPK selaku pemberi amanah. Sehingga semakin besar temuan audit, maka akan semakin besar tingkat pengungkapan LKPD karena *Steward* merasa harus menunjukkan tanggungjawabnya kepada BPK selaku *Principal* agar tercapainya kepentingan organisasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan atas hasil analisis penelitian :

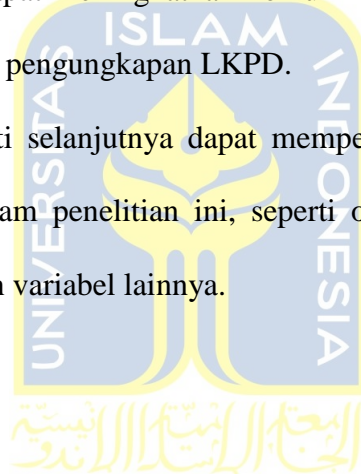
1. Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dalam artian bahwa semakin banyak Pendapatan Asli Daerah, tidak diikuti dengan peningkatan pengungkapan wajib LKPD.
2. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dalam artian bahwa semakin besar total aset Pemerintah Daerah, tidak diikuti dengan peningkatan pengungkapan wajib LKPD.
3. Jumlah SKPD tidak memiliki terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dalam artian bahwa semakin banyak jumlah SKPD Pemerintah Daerah, tidak diikuti dengan peningkatan pengungkapan wajib LKPD.
4. Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dalam artian bahwa semakin banyak jumlah anggota legislatif diikuti dengan peningkatan pengungkapan wajib LKPD dan semakin besar dorongan untuk pemerintah dalam mengungkapkan LKPD dengan baik.
5. Temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dalam artian bahwa semakin besar jumlah kasus-kasus temuan audit tidak berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan wajib

LKPD atau semakin kecil jumlah kasus-kasus temuan audit Pemerintah Daerah, akan diikuti dengan peningkatan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya sebagai pertimbangan dalam pembentukan aturan Pemerintah Daerah, selain itu dapat meningkatkan komunikasi antar daerah dalam rangka peningkatan pengungkapan LKPD.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas variabel terbaru di luar variabel dalam penelitian ini, seperti opini audit, *intergovernmental revenue*, dan variabel lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Albab, M. U. (2015). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2016)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amin, M. T. Al. (2017). *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Nilai Perusahaan Ekspor (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2011-2015)*. Universitas Diponegoro.
- Ernawati, T. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Skpd, Umur Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) (Studi Empiris Lkpd Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014)* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://doi.org/10.5151/cidi2017-060>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *TEORI AKUNTANSI*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Binsis Dan Ekonomi*, 25–33.
- Khasanah, N. L. (2014). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro.

- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Maulana, C. (2015). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*. Universitas Negeri Semarang.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Lkpd. *Accounting Analysis Journal*.
- Mustikarini, A., & Fitriyani, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadi Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi Xv*.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). *Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Telkom Bandung.
- Pratama, K. A. D. (2015). *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Bali Tahun 2010-2013)*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Raharjo, B. (2007). *Keuangan dan Akuntansi*. Graha Ilmu.
- Rahayu, A. (2016). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

- Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada LKPD Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan)* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahmayanti, D. (2018). *Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan [Universitas Indonesia]. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Waliyyani, G. M., & Amir Mahmud. (2015). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Widanti, R. Y. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia* [Universitas Islam Indonesia]. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.78>
- Yulianingtyas, R. R. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia)*. Universitas Sebelas Maret.
- Yuliant, F. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/Kota Di Indonesia)*. Universitas Lampung.
- Medusyam.2020. " Manajemen Keuangan Publik Menurut Mardiasmo ".

Diakses 13 Mei.

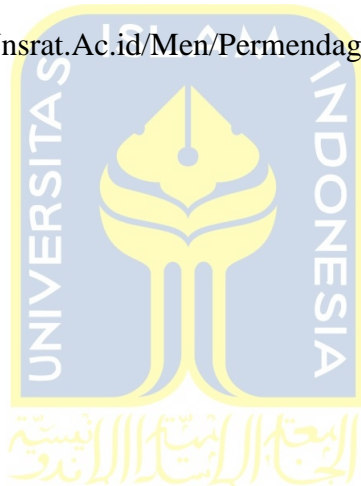
[Http://Thepublicadministration.Blogspot.Com/2012/09/Manajemen-Kuangan-Publik-Menurut.Html](http://Thepublicadministration.Blogspot.Com/2012/09/Manajemen-Kuangan-Publik-Menurut.Html)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tentang Pemerintah Daerah 2014.

[Https://www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/33.Pdf](https://www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/33.Pdf)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2006.

[Http://Hukum.Unsrat.Ac.id/Men/Permendagri_13_2006.Pdf](http://Hukum.Unsrat.Ac.id/Men/Permendagri_13_2006.Pdf)



LAMPIRAN 1

**Tabel Checklist Kriteria Tingkat Pengungkapan LKPD
Sesuai dengan SAP**

| CHECKLIST PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI | | 1 | 0 |
|--|---|----------|----------|
| A | Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, serta pencapaian target sesuai Peraturan Daerah APBD. | | |
| | 1. Kebijakan fiskal/keuangan mengungkapkan: | | |
| | a. Perbedaan penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya/dengan anggaran/dengan rencana lainnya. | | |
| | b. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. | | |
| | 2. Ekonomi makro, menjelaskan pengungkapan: | | |
| | a. Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat pencapaiannya. | | |
| | b. Perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya. | | |
| B | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | 1. | Menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR. | | |
| | 2. | Menjelaskan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu. | | |
| | 3. | Perbandingan target sebagaimana tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. | | |
| C | Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. | | | |
| | Kebijakan Akuntansi | | | |
| | 1. | Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. | | |
| | 2. | Isi kebijakan akuntansi meliputi penjelasan: | | |
| | a. | Entitas pelaporan | | |
| | | i | Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada. | |
| | | ii | Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. | |
| | | iii | Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. | |
| | | iv | Jumlah unit entitas akuntansi yang secara struktural berada dibawahnya. | |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|
| | | b. | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. | | |
| | | | Pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari Laporan Keuangan Pemerintah yang semestinya diungkapkan. | | |
| | | c. | Basis penyusunan laporan keuangan adalah basis kas menuju akrual (<i>cash basis toward accrual</i>), sehingga: | | |
| | | i | Basis yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran adalah basis kas. | | |
| | | ii | Basis yang digunakan dalam neraca adalah basis akrual | | |
| | | d. | Basis pengakuan dan pengukuran: | | |
| | | | Aset | | |
| | | | Pengakuan aset: aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenugasannya berpindah. | | |
| | | | Pengukuran aset, sebagai berikut: | | |
| | | i | Kas dicatat sebesar nilai nominal. | | |
| | | ii | Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. | | |
| | | iii | Piutang dicatat sebesar nilai nominal. | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | iv | Persediaan dicatat sebesar: (1) Biaya perolehan apabila dengan pembelian, (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. | | | |
| | | v | Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya, kecuali untuk investasi dalam saham berdasarkan tingkat kepemilikannya, yakni: 20% kepemilikan saham menggunakan metode biaya; 20%-50% kepemilikan saham menggunakan metode ekuitas; >50% menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan non permanen menggunakan nilai bersih yang direalisasikan. | | | |
| | | vi | Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun jika tidak dimungkinkan dapat didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. | | | |
| | | vii | Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. | | | |
| | | Kewajiban | | | | |
| | | Pengakuan kewajiban: kewajiban diakui jika besar | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.</p> | | |
| | | <p>Pengukuran kewajiban: kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.</p> | | |
| | | <p>Kewajiban dalam mata uang asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.</p> | | |
| | | <p>Ekuitas</p> | | |
| | | <p>Ekuitas secara keseluruhan dicatat sebesar selisih antara aset dan kewajiban.</p> | | |
| | | <p>Ekuitas dana lancar dicatat sebesar selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.</p> | | |
| | | <p>Ekuitas dana investasi dicatat sebesar selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.</p> | | |
| | | <p>Ekuitas dana cadangan dicatat sebesar cadangan yang ditujukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> | | |
| | | <p>Pendapatan</p> | | |
| | | <p>Pengakuan pendapatan: pendapatan diakui pada saat</p> | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. | | |
| | | Pengukuran pendapatan: berdasarkan asa bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. | | |
| | | Belanja | | |
| | | Pengakuan belanja: belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. | | |
| | | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | | Pengakuan penerimaan pembiayaan saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. | | |
| | | Pengukuran penerimaan pembayaran dilaksanakan berdasarkan asa bruto. | | |
| | | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | | Pengukuran pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. | | |
| | | Metode penyajian laporan arus kas | | |
| | | Metode penyajian yang digunakan untuk menyajikan laporan arus kas dan alasannya. | | |
| | | Penjelasan setiap pos pada laporan keuangan | | |

| | | NERACA | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | ASET | | | |
| | | Kas dan setara kas | | | |
| | | Menjelaskan rincian kas yang terdiri dari: | | | |
| | | i | Kas di Kas Daerah | | |
| | | ii | Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| | | iii | Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| | | Investasi Jangka Pendek | | | |
| | | Menjelaskan rincian investasi jangka pendek. | | | |
| | | Perubahan harga pasar. | | | |
| | | Piutang Pajak dan Bukan Pajak | | | |
| | | Menjelaskan rincian piutang yang mencakup: | | | |
| | | i | Piutang pajak | | |
| | | ii | Piutang Retribusi | | |
| | | iii | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | |
| | | iv | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | |
| | | v | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | | |
| | | vi | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| | | vii | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| | | viii | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | | |
| | | ix | Piutang Lainnya | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|
| | | | Persediaan | | |
| | | | Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian persediaan seperti: perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat; barang/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang masih dalam proses produksi yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. | | |
| | | | Kondisi persediaan tersebut. | | |
| | | | Investasi Jangka Panjang | | |
| | | | Menjelaskan rincian investasi jangka panjang berdasarkan jenisnya, meliputi: | | |
| | | i | Investasi Nonpermanen, mencakup: | | |
| | | | (a) Pinjaman Jangka Panjang | | |
| | | | (b) Investasi dalam Surat Utang Negara | | |
| | | | (c) Investasi dalam Proyek Pembangunan | | |
| | | | (d) Investasi Nonpermanen lainnya | | |
| | | | Penjelasan singkat atas perusahaan daerah | | |
| | | | Perubahan pos investasi | | |
| | | ii | Investasi permanen, mencakup: | | |
| | | | (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| | | | (b) Investasi Permanen lainnya | | |
| | | | Penjelasan singkat atas perusahaan daerah | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|
| | | | Perubahan pos investasi | | |
| | | | Aset Tetap | | |
| | | | Menjelaskan klarifikasi aset tetap dan rincian lebih lanjut, meliputi: | | |
| | | i | Rincian Tanah | | |
| | | | Penambahan/Pelepasan Tanah | | |
| | | ii | Rincian Peralatan dan Mesin | | |
| | | | Penambahan/Pelepasan Peralatan dan Mesin | | |
| | | iii | Rincian Gedung dan Bangunan | | |
| | | | Penambahan/Pelepasan Gedung dan Bangunan | | |
| | | iv | Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| | | | Penambahan/Pelepasan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| | | v | Rincian Aset Tetap Lainnya | | |
| | | | Penambahan/Pelepasan Aset Tetap Lainnya | | |
| | | vi | Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| | | | Informasi penyusutan, meliputi: | | |
| | | i | Nilai penyusutan | | |
| | | ii | Metode penyusutan yang digunakan | | |
| | | iii | Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan | | |
| | | iv | Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode | | |
| | | | Tambahan jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| | | | kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: | | |
| | | i | Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap | | |
| | | ii | Tanggal efektif penilaian kembali | | |
| | | iii | Jika ada, nama penilai independen | | |
| | | iv | Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti | | |
| | | v | Nilai tercatat setiap jenis aset tetap | | |
| | | | Tambahan untuk konstruksi dalam pengerjaan, meliputi: | | |
| | | i | Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya | | |
| | | ii | Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya | | |
| | | iii | Jumlah biaya yang telah dikeluarkan | | |
| | | iv | Uang muka kerja yang diberikan | | |
| | | v | Retensi | | |
| | | | Dana Cadangan | | |
| | | | Penjelasan dana cadangan, meliputi: | | |
| | | i | Perda pembentukkannya | | |
| | | ii | Tujuan, jumlah, bentuk penanaman dana cadangan, dan rencana penggunaannya | | |
| | | | Aset Lainnya | | |
| | | | Menjelaskan rincian aset lainnya yang mencakup: | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | i | Tagihan Penjualan Angsuran | | | |
| | | ii | Tuntutan Perbendaharaan | | | |
| | | iii | Tuntutan Ganti Rugi | | | |
| | | iv | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | | |
| | | v | Aset Tak Berwujud | | | |
| | | vi | Aset Lain-lain | | | |
| | | KEWAJIBAN | | | | |
| | | Utang Jangka Pendek | | | | |
| | | Rincian utang jangka pendek berdasarkan pemberi pinjaman, mencakup: | | | | |
| | | i | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | | |
| | | ii | Utang Bunga | | | |
| | | iii | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | | |
| | | iv | Pendapatan Dibayar Dimuka | | | |
| | | v | Utang Belanja | | | |
| | | vi | Utang Jangka Pendek Lainnya | | | |
| | | Utang Jangka Panjang | | | | |
| | | Rincian utang jangka panjang pemberi pinjaman, mencakup: | | | | |
| | | i | Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan | | | |
| | | ii | Utang dalam Negeri-Obligasi | | | |
| | | iii | Premium (Diskonto) Obligasi | | | |
| | | iv | Utang Jangka Panjang Lainnya | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| | | Jumlah tunggakan disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. | | |
| | | Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. | | |
| | | Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. | | |
| | | Biaya pinjaman meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang digunakan. | | |
| | | Utang Jangka Panjang yang direstrukturisasi harus mengungkapkan: | | |
| | i | Pengurangan pinjaman | | |
| | ii | Modifikasi persyaratan utang | | |
| | iii | Pengurangan tingkat bunga pinjaman | | |
| | iv | Pengunduran jatuh tempo pinjaman | | |
| | v | Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman | | |
| | vi | Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan | | |
| | | EKUITAS | | |
| | | Klasifikasi ekuitas, meliputi: | | |
| | i | Ekuitas Dana Lancar | | |
| | | Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana lancar, meliputi: | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | (a) Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) | | | |
| | | | (b) Cadangan Piutang | | | |
| | | | (c) Cadangan Persediaan | | | |
| | | | (d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | | | |
| | | ii | Ekuitas Dana dan Investasi | | | |
| | | | Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana investasi yang meliputi investasi yang: | | | |
| | | | (a) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang | | | |
| | | | (b) Diinvestasikan dalam aset tetap | | | |
| | | | (c) Diinvestasikan dalam aset lainnya | | | |
| | | | (d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | | | |
| | | iii | Ekuitas Dana Cadangan | | | |
| | | | Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana cadangan | | | |
| | | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | | | | |
| | | PENDAPATAN | | | | |
| | | Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan, meliputi: | | | | |
| | | i | Rincian dan penjelasan PAD, yang terdiri dari: | | | |
| | | | (a) Pendapatan pajak daerah | | | |
| | | | (b) Pendapatan retribusi daerah | | | |
| | | | (c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|---|--|--|
| | | | yang dipisahkan | | |
| | | | (d) Lain-lain PAD yang sah | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran PAD. | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang PAD periode ini dengan PAD periode yang lalu. | | |
| | | ii | Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer yang terdiri dari: | | |
| | | | (a) Dana Perimbangan | | |
| | | | Dana Bagi Hasil Pajak | | |
| | | | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | |
| | | | Dana Alokasi Umum | | |
| | | | Dana Alokasi Khusus | | |
| | | | (b) Pendapatan Transfer Lainnya | | |
| | | | Dana Otonomi Khusus | | |
| | | | Dana penyesuaian | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran transfer. | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara tranfer | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--|
| | | | periode ini dan transfer periode yang lalu. | | | |
| | | iii | Rincian dan penjelasan lain-lain pendapatan yang sah , yang terdiri dari: | | | |
| | | | (a) Pendapatan Hibah | | | |
| | | | (b) Pendapatan Dana Darurat | | | |
| | | | (c) Pendapatan lainnya | | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran lain-lain pendapatan yang sah. | | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara lain-lain pendapatan yang sah periode ini dan lain-lain pendapatan yang sah periode lalu. | | | |
| | | BELANJA | | | | |
| | | i | Rincian dan penjelasan belanja operasi, yang terdiri dari: | | | |
| | | | (a) Belanja Pegawai | | | |
| | | | (b) Belanja Barang | | | |
| | | | (c) Bunga | | | |
| | | | (d) Subsidi | | | |
| | | | (e) Hibah | | | |
| | | | (f) Bantuan Sosial | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| | | | Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja. | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu. | | |
| | | ii | Rincian dan penjelasan belanja modal, yang terdiri dari: | | |
| | | | (a) Belanja Tanah | | |
| | | | (b) Belanja Peralatan dan Mesin | | |
| | | | (c) Belanja Gedung dan Bangunan | | |
| | | | (d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| | | | (e) Belanja Aset Tetap Lainnya | | |
| | | | (f) Belanja Aset Lainnya | | |
| | | | Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja. | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu. | | |
| | | iii | Belanja Tak Terduga | | |
| | | | Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | dan anggaran belanja. | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu. | | |
| | | | TRANSFER | | |
| | | i | Rincian transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota, terdiri dari: | | |
| | | | (a) Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota | | |
| | | | (b) Retribusi | | |
| | | | (c) Pendapatan lainnya | | |
| | | | Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran transfer. | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu. | | |
| | | | PEMBIAYAAN | | |
| | | i | Rincian penerimaan pembiayaan, mencakup: | | |
| | | | (a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) | | |
| | | | (b) Pencairan dana cadangan | | |
| | | | (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|
| | | | (d) Pinjaman Dalam Negeri | | |
| | | | (e) Penerimaan kembali pinjaman | | |
| | | | (f) Penerimaan piutang daerah | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran penerimaan pembiayaan. | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara penerimaan pembiayaan periode ini dan penerimaan pembiayaan periode yang lalu. | | |
| | | ii | Rincian pengeluaran pembiayaan | | |
| | | | (a) Pembentukan dana cadangan | | |
| | | | (b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | |
| | | | (c) Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri | | |
| | | | (d) Pemberian pinjaman | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran pengeluaran pembiayaan. | | |
| | | | Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pengeluaran pembiayaan periode ini dan pengeluaran pembiayaan periode yang lalu. | | |
| | | | LAPORAN ARUS KAS | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|
| | | i | Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar dari aktivitas operasi | | | |
| | | ii | Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari investasi aset nonkeuangan | | | |
| | | iii | Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan | | | |
| | | iv | Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran | | | |
| | | e. | Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan masa transisi SAP | | | |
| | | f. | Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan Keuangan | | | |
| D | Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan | | | | | |
| | 1. | Penjelasan mengenai kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. | | | | |
| E | Pengungkapan lainnya | | | | | |
| | 1. | Mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, penggabungan/pemekaran entitas tahun berjalan, kejadian yang mempunyai dampak social. | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| | Total Item | | |
|--|-------------------|--|--|

Sumber: (Rahmayanti, 2019), (Undang-undang Republik Indonesia
No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)



LAMPIRAN 2

Tabel tingkat pengungkapan LKPD

| Kabupaten/Kota | Total item yang harus diungkapkan | Jumlah item yang diungkapkan | | | | | Tingkat pengungkapan LKPD Provinsi | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pangkalpinang | 185 | 105 | 96 | 101 | 104 | 118 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.64 |
| Belitung Timur | 185 | 106 | 107 | 112 | 110 | 101 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
| Belitung | 185 | 93 | 106 | 104 | 104 | 108 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| Bangka Tengah | 185 | 102 | 115 | 111 | 106 | 107 | 0.55 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.58 |
| Bangka Selatan | 185 | 93 | 110 | 105 | 104 | 111 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.60 |
| Bangka Barat | 185 | 104 | 114 | 109 | 84 | 113 | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.45 | 0.61 |
| Bangka | 185 | 99 | 111 | 101 | 106 | 110 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |

LAMPIRAN 3

Tabel Ukuran Legislatif

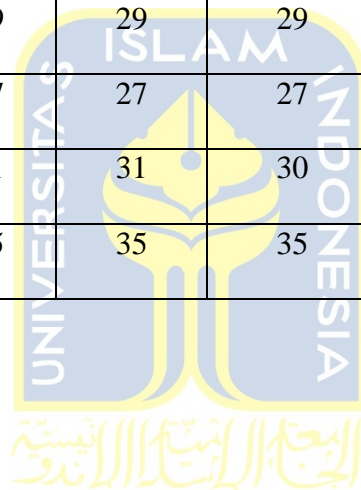
| Kabupaten/Kota | Jumlah Anggota DPRD | | | | |
|----------------|---------------------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pangkalpinang | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Belitung Timur | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Belitung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bangka Tengah | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bangka Selatan | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bangka Barat | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bangka | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |



LAMPIRAN 4

Tabel jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kabupaten/Kota | SKPD | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pangkalpinang | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Belitung Timur | 34 | 34 | 34 | 23 | 23 |
| Belitung | 40 | 40 | 40 | 28 | 28 |
| Bangka Tengah | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 |
| Bangka Selatan | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 |
| Bangka Barat | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 |
| Bangka | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 |

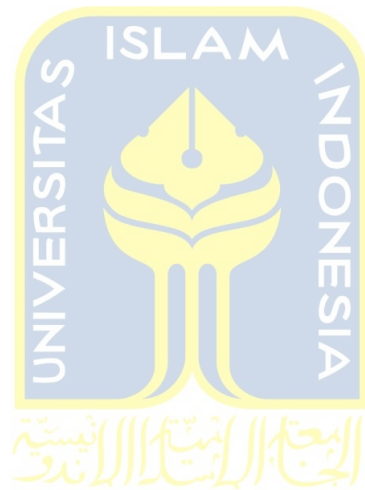


LAMPIRAN 5

Tabel Ukuran Pemerintah

| Kabupaten/ Kota | TOTAL ASET | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pangkalpinang | 21790190670 59.25 | 191750240809 4.34 | 223659758253 0.53 | 272916630559 2.45 | 2991807700072 .45 |
| Belitung Timur | 18771983785 83.09 | 123459660782 4.78 | 127112670511 2.68 | 126757312982 2.53 | 1379362305808 .71 |
| Belitung | 18159348082 45.40 | 118529254415 9.25 | 115704031331 9.67 | 120813739468 4.76 | 1459982642591 .51 |
| Bangka Tengah | 14527156096 48.27 | 162864455838 8.67 | 163416927295 9.41 | 180397828151 2.20 | 1906039597185 .07 |
| Bangka Selatan | 15473574926 16.89 | 120316334755 8.85 | 121042878465 4.03 | 123933098158 9.88 | 1386095748341 .22 |
| Bangka Barat | 11213926381 44.85 | 139112009169 3.29 | 147227614599 6.92 | 137973252249 4.36 | 1469108386395 .64 |

| | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Bangka | 21615500601 | 173145088117 | 160054779357 | 168492279003 | 2075843726925 |
| | 91.79 | 8.70 | 9.73 | 5.24 | .06 |



LAMPIRAN 6

Tabel Kekayaan Daerah

| Kabupaten/ Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pangkalpinang | 11381727838 5.97 | 13530578255 9.87 | 13625739897 3.11 | 17394711286 1.17 | 16713199166 5.98 |
| Belitung Timur | 39916055462. 69 | 56300674425 .60 | 52662192020 .01 | 78486881529 .45 | 69765373034 .63 |
| Belitung | 28907044191. 72 | 38734330398 .88 | 46255276506 .75 | 84707727750 .31 | 49427844307 .14 |
| Bangka Tengah | 89113748853. 54 | 11595755419 1.01 | 12905962169 0.70 | 19607048677 2.76 | 17305693482 8.79 |
| Bangka Selatan | 61632402924. 42 | 66341267135 .93 | 73459526744 .49 | 97375136679 .82 | 75995335730 .86 |
| Bangka Barat | 72695257570. 74 | 86065752914 .86 | 90361562416 .57 | 10965737353 9.57 | 10945628624 6.75 |

| | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bangka | 11045141567 | 12579139180 | 13822768115 | 19319626584 | 19193896949 |
| | 7.67 | 1.15 | 1.74 | 8.73 | 5.04 |



LAMPIRAN 7

Tabel Temuan audit

| Kabupaten/Kota | Temuan Audit | | | | |
|----------------|--------------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pangkalpinang | 17 | 11 | 15 | 5 | 8 |
| Belitung Timur | 11 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| Belitung | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| Bangka Tengah | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| Bangka Selatan | 17 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| Bangka Barat | 9 | 7 | 7 | 15 | 8 |
| Bangka | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 |



LAMPIRAN 8

Hasil Uji dan Regresi

1. Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| LEGISLATIFF | 30 | 25 | 30 | 26,17 | 2,151 |
| SKPD | 30 | 23 | 40 | 30,87 | 4,384 |
| ASET | 30 | 27,75 | 32,41 | 282,240 | ,82976 |
| KEKAYAAN DAERAH | 30 | 24,38 | 26,00 | 253,103 | ,45687 |
| TEMUAN | 30 | 4 | 15 | 7,60 | 2,699 |
| PENGUNGKAPAN | 30 | ,45 | ,64 | ,5750 | ,03530 |
| Valid N (listwise) | 30 | | | | |

2. Uji Normalitas

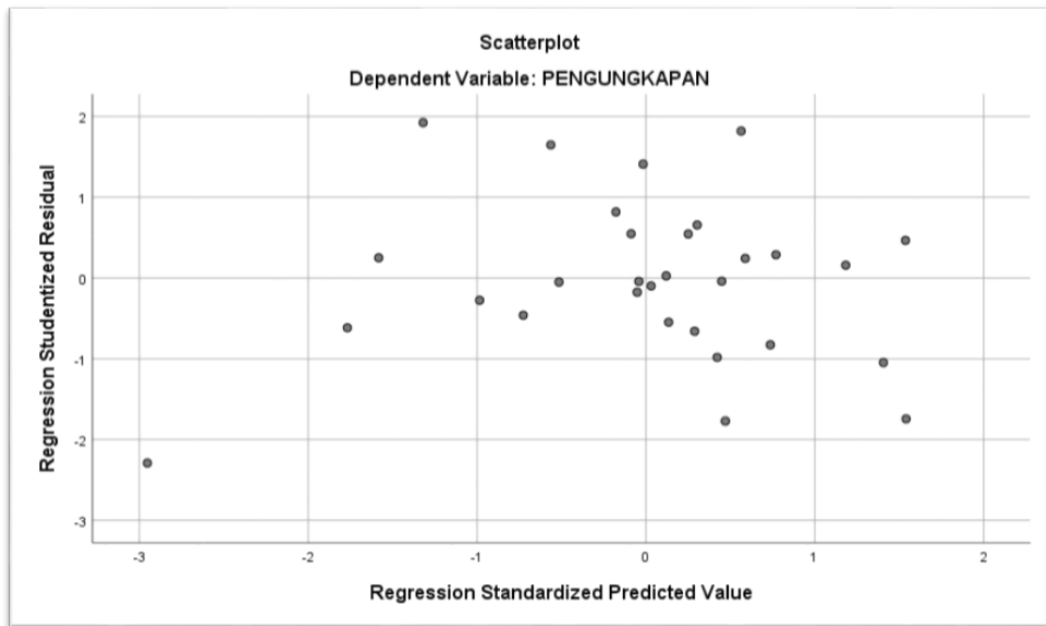
| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| | | 30 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,02753459 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,095 |
| | Positive | ,086 |
| | Negative | -,095 |
| Test Statistic | | ,095 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |



3. Uji Multikolinieritas

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 1,007 | ,446 | | 2,261 | ,033 | | |
| | Legislatif | ,007 | ,003 | ,418 | 2,079 | ,048 | ,629 | 1,591 |
| | Skpd | ,000 | ,001 | ,054 | ,294 | ,771 | ,744 | 1,343 |
| | Aset | -,001 | ,008 | -,034 | -,183 | ,857 | ,714 | 1,400 |
| | Kekayaan Daerah | -,021 | ,015 | -,270 | - 1,355 | ,188 | ,639 | 1,564 |
| | Temuan | -,007 | ,002 | -,568 | - 3,498 | ,002 | ,961 | 1,040 |

4. Uji Heteroskedastisitas



5. Analisis Regresi Linier Berganda

| Model Summary ^b | | | |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| ,626 ^a | ,392 | ,265 | ,03027 |

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1,007 | ,446 | | 2,261 | ,033 |
| | Legislatif | ,007 | ,003 | ,418 | 2,079 | ,048 |
| | Skpd | ,000 | ,001 | ,054 | ,294 | ,771 |
| | Aset | -,001 | ,008 | -,034 | -,183 | ,857 |
| | Kekayaan Daerah | -,021 | ,015 | -,270 | -1,355 | ,188 |
| | Temuan | -,007 | ,002 | -,568 | -3,498 | ,002 |